

Konflik Sosial Pada Pilkada Di Luwu Timur (Studi Kasus Relasi Sosial Pasca Pemilihan Bupati 2020)

**Ma'rif Amirullah, Dewi
Aggariani**
Prodi Sosiologi Agama UIN
Alauddin Makassar
Aggarianid21@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini menjelaskan tentang konflik sosial pada pilkada di Luwu Timur studi kasus relasi sosial pasca pemilihan bupati 2020. Penelitian ini menggunakan deskriptif kualitatif dengan menggunakan pendekatan sosiologis dan pendekatan fenomenologi. Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori konflik. Teori konflik adalah teori yang memandang bahwa perubahan sosial terjadi tidak melalui proses penyesuaian nilai-nilai yang membawa perubahan, terjadi karena adanya konflik yang menghasilkan kompromi-kompromi yang berbeda dengan kondisi semula. Konflik terjadi karena adanya hubungan sosial atau komunikasi, apabila kita ingin mengetahui konflik maka harus memahami pola dan perilaku komunikasi, dan konflik tidak selalu disebabkan oleh komunikasi yang buruk. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa (1) Bentuk konflik sosial pada pilkada di Kabupaten Luwu timur kecamatan Towuti Desa Langkea Raya, dan Kecamatan Angkona Desa Tampinna adalah berupa kekerasan fisik dan kekerasan non fisik (2) Relasi masyarakat sebelum masa pemilihan relasi ada yang baik-baik saja, ada juga sebaliknya memilih untuk tidak menjalin hubungan, serta relasinya menjaga jarak hubungan sebatas masa pesta demokrasi saja.

Kata Kunci: Konflik, Pilkada, Relasi Sosial, Luwu Timur

A. Pendahuluan

Indonesia merupakan negara hukum yang demokratis yang bersumber dari konsep kedaulatan hukum dan kedaulatan rakyat dimana merupakan konsepsi yang sudah di idealkan oleh para pendiri bangsa Indonesia. Dalam menjalankan kekuasaan sebagai bangsa yang merdeka harus didasarkan sesuai dengan UUD, sebagai norma hukum tertinggi yang mengatur penyelenggaraan negara. Pemilu memiliki hubungan yang erat dengan negara demokrasi dan negara hukum, inti dari demokrasi adalah partisipasi rakyat dalam

pembentukan dan penyelenggaraan pemerintah melalui partisipasi, representasi dan pengawasan.

Pemilihan umum merupakan perwujudan nyata demokrasi dalam praktik bernegara masa kini (modern) karna menjadi sarana utama bagi rakyat untuk menyatakan kedaulatannya atas negara dan pemerintah. Pernyataan kedaulatan rakyat tersebut diwujudkan dalam proses pelibatan masyarakat untuk menentukan siapa-siapa saja yang harus menjalankan dan di sisi lain mengawasi pemerintahan. Karena itu, fungsi utama bagi rakyat adalah “untuk memilih dan melakukan pengawasan terhadap wakil-wakil mereka”.¹

Pilkada (Pemilihan Kepala Daerah) adalah salah satu sarana demokrasi bagi masyarakat di tiap daerah untuk ikut menentukan figur dan arah kepemimpinan dalam periode tertentu. Ketika demokrasi mendapat perhatian yang luas dari masyarakat maka penyelenggaraan pilkada yang demokratis menjadi syarat penting dalam pembentukan kepemimpinan sebuah daerah. Dalam perjalanannya, dimana Pemilihan Kepala Daerah (Pemilukada) yang demokratis menjadi acuan utama untuk mencapai kesepakatan dalam menentukan seorang pemimpin, ternyata tidak seperti yang diharapkan. Terjadinya konflik yang berawal dari ketidakadilan, kecurangan, ujaran kebencian, kesalahpahaman, *black campaign*, perbedaan pandangan atau perbedaan dukungan ke salah satu calon, isu-isu yang mengandung SARA sehingga mengskreditkan salah satu calon mengantarkan masyarakat terpolarisasi.

Konflik seringkali terjadi dalam proses interaksi antar-individu, individu dengan kelompok, maupun kelompok dengan kelompok yang masing-masing disebabkan oleh perbedaan baik dalam latar belakang interaksi, kemampuan berinteraksi, maupun tujuan berinteraksi. Tidak terkecuali konflik juga terjadi pada masyarakat Indonesia yang mempunyai latar belakang politik, etnis, dan agama yang sangat berbeda-beda. Dari latar belakang yang beragam ini, corak konflik di Indonesiapun juga beragam. Seperti halnya konflik politik (red: pilkada), hanya karena perbedaan dukungan terhadap calon kepala daerah dapat terjadi percekocan dan perselisihan didalam masyarakat, bahkan terjadi di skop kecil yaitu dalam skala rumah tangga.

Kabupaten Luwu Timur adalah salah satu daerah yang melakukan pemilihan kepala daerah serentak beserta 269 daerah yang lainnya dimana riciannya 9 Provinsi, 224 Kabupaten, dan 37 Kota. Pilkada serentak Tahun 2020 seharusnya diikuti 269 daerah, namun menjadi 270 karena Pilkada Makassar diulang pelaksanaannya². Pemilukada di Luwu Timur berhasil menjang 2 pasangan calon Bupati yaitu pasangan calon nomor urut 1 Ir H.

¹Fatahuddin Jurdi, *Studi Ilmu Politik*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2014) h.77.

² Tim detikcom, “Ini 270 Daerah Yang Gelar Pilkada Serentak 2020” diakses dari <https://news.detik.com/berita/d-4596501/ini-270-daerah-yang-gelar-pilkada-serentak-2020>, pada tanggal 10 Februari 2021 pukul 14.24.

Muhammad Thorig Husler dan Drs. H, Budiman, M. Pd pasangan calon nomor urut 2 yaitu Irwan Bachri Syam, ST dan Andi Muh. Rio Pattiwiri, SH, M. Kn hasil perolehan suara dari KPU Kabupaten yaitu pasangan calon nomor urut 1 itu berjumlah 86.351 suara, pasangan calon nomor urut 2 berjumlah 77.228 suara jadi perolehan suara Suara yang unggul oleh pasangan nomor urut 1.

Kasus konflik yang terjadi sebelum dan setelah pilkada, seperti antar keluarga dimana karena berbeda pilihan menjadikan mereka saling maki dan tidak berinteraksi, yang lain adalah antar kelompok anak muda, pendukung dari masing-masing calon. Hal ini menyebabkan retaknya hubungan interaksi dalam masyarakat yang dimana ketika kita sebagai masyarakat seharusnya bisa hidup harmonis antar sesama terlepas dari kondisi apapun, seperti dalam QS. Luqman/31: 18-19 berikut:

وَلَا تُصَعِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ كُلَّ مُخْتَالٍ فَخُورٍ وَأَقْصِدْ فِي مَشْيِكَ
وَاعْظُضْ مِنْ صَوْتِكَ إِنَّ أَنْكَرَ الْأَصْوَاتِ لَصَوْتُ الْحَمِيرِ

Terjemahnya:

Dan janganlah kamu memalingkan mukamu dari manusia (karena sombong) dan janganlah kamu berjalan di muka bumi dengan angkuh. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong lagi membanggakan diri. Dan sederhanalah kamu dalam berjalan dan lunakkanlah suaramu. Sesungguhnya seburuk-buruk suara ialah suara keledai.

Dalam pemilihan ini, masyarakat Luwu Timur berharap dapat menghasilkan pemimpin yang adil, dapat menjalankan amanah serta menjaga *interaksi asosiatif* dengan warganya bukan *interaksi disosiatif*³

A. Landasan Teori

a. Teori Konflik

Konflik merupakan salah satu konsep dasar ilmu politik, sebagai makhluk sosial manusia tidak bisa terlepas dari interaksi dengan orang lain terutama dalam mencapai tujuan hidupnya. Manusia yang secara kodrati dilengkapi dengan nafsu, emosi dalam melakukan hubungan dengan manusia lainnya, sering terjadi pertentangan, kesalahpahaman antara individu dengan individu, antara individu dengan kelompok maupun individu dengan kelompok dan pemerintah. Teori konflik adalah teori yang memandang bahwa perubahan sosial terjadi tidak melalui proses penyesuaian nilai-nilai yang membawa perubahan, terjadi karena adanya konflik yang menghasilkan kompromi-kompromi yang berbeda dengan

³Interaksi Asosiatif adalah bentuk interaksi sosial yang positif, yang mengarah pada kesatuan dan kerja sama. Sedangkan interaksi Disosiatif adalah bentuk interaksi sosial yang lebih mengarah kepada konflik dan perpecahan, baik individu maupun kelompok.

kondisi semula. Konflik terjadi karena adanya hubungan sosial atau komunikasi, apabila kita ingin mengetahui konflik maka harus memahami pola dan perilaku komunikasi, dan konflik tidak selalu disebabkan oleh komunikasi yang buruk.⁴

Menurut Weber mengistilahkan konflik sebagai suatu sistem otoritas atau sistem kekuasaan. Perbedaan antara otoritas dan kekuasaan yaitu sebagai berikut; kekuasaan cenderung menaruh kepercayaan yaitu kekuatan, sedangkan otoritas adalah kekuasaan yang diletigimaskan, yaitu kekuasaan yang telah mendapat pengakuan umum, tindakan manusia itu didorong oleh kepentingan yang bersifat material seperti dikatakan Marx, melainkan juga oleh kepentingan-kepentingan ideal. Sepanjang manusia itu adalah seorang individu yang dengan bebas memberikan arti dan interpretasi terhadap kenyataan yang ada diluarnya dan sepanjang tatanan-tatanan yang ada dalam masyarakat itu menuntut penyesuaian dari individu, maka konflik akan selalu mungkin terjadi.

Pernyataan-pernyataan Weber itu tentu saja dapat mengingatkan bahwa konflik adalah suatu realitas sosial yang menyertai kehidupan sosial manusia. Oleh karena itu, haruslah senantiasa disadari agar kita tebuai dalam mimpi yang membayangkan keadaan masyarakat tanpa ketegangan, tanpa percekocokan, ataupun tanpa perang. Konflik itu eksis dan hidup bersama kehidupan sosial masyarakat.⁵

Dengan mengikuti penjelasan Ramlan Surbakti tentang pengertian konflik politik, terdapat penjelasan mengenai konflik politik yaitu sebagai berikut. Konflik politik adalah konflik yang berhubungan dengan pertentangan kepentingan publik. Konflik politik adalah yang berkaitan dengan penyelenggaraan negara dan pemerintahan. Secara vertikal, konflik dapat terjadi antara penyelenggaraan negara dan rakyat, terutama ketika rakyat merasa di tindas atau diperlakukan tidak adil. Secara penguasa dan masyarakat yang mengiginkan pergantian kekuasaan. Konflik politik merupakan konflik yang terjadi sebagai akibat dan adanya perebutan kekuasaan. Dalam arti luas mencakup mencari, mempertahankan, dan menjalankan kekuasaan. Kekuasaan (*power*) memiliki tiga dimensi, yaitu daya paksa (*force*), konflik politik tidak akan melibatkan berbagai hal yang ada dalam dimensi kekuasaan tersebut. Dalam teori kedaulatan, dijelaskan tentang alasan negara sebagai organisasi kekuasaan mempunyai kedaulatan atau kekuasaan tertinggi untuk menggunakan daya paksanya kepada rakyat, sedangkan teori legitimasi kekuasaan menjelaskan sumber yang mendasari kekuasaan seseorang sehingga diterima oleh rakyat.⁶ Konflik politik muncul kepermukaan ketika penguasa mengalami delegitemasi atau ketika daya paksa yang digunakan melampaui batas pemahaman masyarakat tentang kekuasaan.

⁴Suripto. Jurnal Politikologi : “*Analisis penyelesaian sengketa atau konflik politik*”. Vol 3, No 1, Oktober 2016, h.83.

⁵Wirawan, Prof.DR. I.B. *Teori-teori sisal dalam paradigma*. (Jakarta: kencana 2012) h.69-70

⁶Muslim Mufti M.Si. *Teori-Teori Politik.*, (Bandung: Cv Pustaka Setia, 2013) h.158.

Sebagai kegiatan yang berkaitan dengan perumusan dan pelaksanaan kebijakan umum. Proses politik berlangsung dari adanya artikulasi dari masyarakat, kemudian diintegrasikan untuk dimunculkan dalam tuntutan sebagai bagian dari input dalam proses politik. Jika memperoleh dukungan, tuntutan tersebut menjadi isu yang siap untuk di proses atau dirumuskan dalam kebijakan umum, mengingat kepentingan masyarakat berbeda beda. Perbedaan ini terkait dengan kebudayaan, lingkungan sosial, alam dan sebagainya tuntutan masyarakat pun menjadi beragam dan keberagaman itulah yang sering memunculkan konflik.

Dalam mempertahankan sumber-sumber yang dianggap penting. Dalam demokrasi pluralistik, negara/pemerintahan merupakan wahana tempat terjadinya interaksi kepentingan berbagai kelompok dan penetapan keputusannya. Perbedaan kepentingan inilah yang menimbulkan berbagai konflik karena setiap masyarakat menginginkan agar tuntutan yang *penting bagi dirinya terpenuhi*.

b. Sumber-Sumber Konflik

Salah satu sumber konflik politik adalah adanya struktur yang terdiri dari penguasa politik dan sejumlah orang yang dikuasai. Struktur ini menyebabkan bahwa konflik politik yang utama adalah antara penguasa politik dan sejumlah orang yang menjadi obyek kekuasaan politik. Konflik yang hebat antara penguasa politik dengan rakyatnya sendiri karena ketidakmampuan penguasa politik memahami dan membela kepentingan rakyat. Rakyat tidaklah patut disalahkan sebagai penyebab konflik politik. Hal itu perlu diperhatikan bahwa konflik politik ditimbulkan oleh adanya keterbatasan sumberdaya dan posisi. Semakin tinggi tingkat kelangkaan sumber daya yang dibutuhkan untuk hidup semakin besar kemungkinan terjadinya konflik politik.⁷

Konflik politik juga dapat muncul kepermukaan pada dasarnya ada dua hal yaitu karena adanya kemajemukan horisontal dan kemajemukan vertikal. Maksud dari kemajemukan horisontal ialah struktur masyarakat yang majemuk secara kultural, seperti suku bangsa, daerah, agama, dan ras dan majemuk secara sosial dalam arti perbedaan pekerjaan atau profesi seperti petani, buruh, pedagang, pengusaha, dan lain lain. Kemajemukan vertikal adalah struktur masyarakat yang terpolarisasikan menurut pemikiran kekayaan, pengetahuan dan kekuasaan.

c. Tipe-Tipe Konflik

Tipe konflik dikelompokkan menjadi dua tipe. Kedua tipe ini meliputi konflik positif dan konflik negatif. Yang dimaksud dengan konflik positif ialah yang tak mengancam eksistensi sistem politik, yang biasanya disalurkan lewat mekanisme penyelesaian konflik politik, yang biasanya disalurkan lewat mekanisme dimaksud ialah lembaga-lembaga demokrasi, seperti partai politik, badan-badan perwakilan rakyat, pengadilan, pemerintah,

⁷Cholisin & Nasiwan. *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, h.15.

pers, dan forum-forum terbuka yang lain. Konflik negatif ialah konflik yang dapat mengancam eksistensi sistem politik yang biasanya disalurkan melalui cara-cara nonkonstitusional, seperti kudeta, separtisme, terorisme dan revolusi.⁸

d. Penyelesaian Konflik

Konsensus politik merupakan penyelesaian konflik politik secara damai. Dengan demikian penyelesaian konflik berhasil dicapai. Maswadi Rauh (2001:35-36) menyatakan bahwa penyelesaian konflik politik dapat dilakukan dengan pemilu sebagai cara mencapai konsensus politik dan pemungutan suara. Pemilu sebagai cara mencapai konsensus politik, merupakan konsensus politik yang terdiantara pihak-pihak yang terlibat konflik politik yang biasanya berjumlah banyak diselesaikan oleh rakyat melalui pemilu. Referendum yang merupakan pemilu untuk menyelesaikan perbedaan tentang masalah tertentu dapat dikategorikan dalam pemilu.⁹

Musyawarah sebagai cara mencapai konsensus. Musyawarah dilakukan antara pihak-pihak yang terlibat konflik politik tanpa adanya mediator karena penyelesaian konflik politik tidak bisa ditentukan pihak lain tanpa persetujuan pihak konflik. Jika terjadi konflik politik dalam masyarakat maka pihak yang terlibat dalam konflik, setelah berhasil merumuskan tuntutan mereka kepada pemerintah, mereka akan melakukan politisasi.

Teori yang peneliti ungkit ada dua yaitu konflik yang berwujud kekerasan dan konflik tidak berwujud kekerasan atau konflik verbal, terealisasikan dua konflik tersebut ternyata terbukti dilapangan sesuai pernyataan informan yang sudah peneliti cantumkan dalam hasil penelitian.

B. Metode Penelitian

a. Jenis dan Lokasi Penelitian

1. Jenis Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif. Peneliti menggunakan metode ini untuk mengetahui lebih dalam mengenai konflik sosial pada pilkada di Kabupaten Luwu Timur pasca pemilihan bupati tahun 2020, sehingga variable-variabel yang berkaitan dengan penelitian ini dapat diperoleh jawaban dari permasalahan secara mendalam. Oleh karena itu, objek yang akan dijadikan fokus pada penelitian ini berupa fenomena atau gejala yang akan sulit dijelaskan dengan angka-angka, namun lebih mudah untuk dijelaskan dengan menggunakan penjelasan melalui kata-kata.

Jenis penelitian yang digunakan oleh peneliti adalah Penelitian lapangan (*field research*) dengan menggunakan metode kualitatif, berupa deskriptif. Penelitian deskriptif

⁸Ramlan Surbakti. *Memahami Ilmu Politik*. (Jakarta: Gramedia Widia Sarana Indonesia, 2010) h. 194.

⁹Cholisin & Nasiwan. *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, h. 163.

merupakan metode penelitian yang berusaha menggambarkan dan menginterpretasikan objek apa adanya.¹⁰

2. Lokasi Penelitian

Lokasi Penelitian ini dilaksanakan di Kabupaten Luwu Timur yaitu kecamatan Towuti Desa Langkearaya, dan Kecamatan Angkona Desa Tampinna. Karena peneliti melihat di Desa Langkearaya banyak kasus yang terjadi, dan di Desa Tampinna merupakan tempat tinggal peneliti sehingga memudahkan dalam penelitian.

b. Pendekatan Penelitian

1. Pendekatan Sosiologis

Pendekatan sosiologis adalah suatu pendekatan yang secara umum digunakan pada penelitian sosial. Pendekatan ini digunakan dengan cara mengaitkan teori-teori sosial dalam hal ini teori konflik dan teori interaksi sosial yang berkaitan dengan suatu fenomena-fenomena sosial yang terjadi dan menjadi titik fokus dalam penelitian.

2. Pendekatan Fenomenologi

Pendekatan Fenomenologi merupakan pendekatan yang menekankan bagaimana komunikasi dapat mengungkapkan makna-makna dari komunikasi yang ada sehingga hasil penelitian yang diperoleh berhubungan dengan pemaknaan dari sebuah proses komunikasi yang terjadi. Pendekatan komunikasi bertujuan untuk mengetahui bagaimana bentuk komunikasi yang dilakukan antara masyarakat dengan masyarakat yang lainnya yang ada di Kabupaten Luwu Timur.

c. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini terdiri dari dua data, yaitu:

1. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari objek penelitian dengan cara menggunakan daftar pertanyaan atau wawancara. Objek penting yang peneliti wawancarai adalah, kepala keluarga, ibu rumah tangga, tim sukses kedua kubu, pemuda, aparat pemerintah.

2. Data Sekunder

Data sekunder atau data pendukung dalam penelitian ini adalah berupa hasil penelitian, buku-buku, serta jurnal yang berkaitan dengan penelitian yang peneliti lakukan.

¹⁰Sudaryono Dikutip Dan Cresell, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: Pt Raja Grafindo Persada, 2017), h. 82.

d. Metode Pengumpulan Data

1. Observasi

Observasi dilaksanakan dengan cara turun lapangan dan mengamati secara langsung keadaan yang peneliti teliti dalam hal ini hubungan interaksi masyarakat pasca Pilkada 2020 di Kabupaten Luwu Timur.

2. Wawancara

Wawancara merupakan interaksi tanya jawab antara peneliti dengan informan untuk mendapatkan sebuah informasi. Adapun tujuan dilaksanakan wawancara yaitu untuk mendapatkan informasi yang maksimal mengenai bentuk konflik sosial dan hubungan relasi masyarakat pasca Pilkada 2020 di kabupaten Luwu Timur.

3. Dokumentasi

Dokumentasi yaitu cara untuk mendapatkan berbagai informasi baik dalam bentuk tulisan ataupun gambar serta karya-karya yang sesuai dengan peristiwa yang akan diteliti. Dimana dalam hal ini penulis melakukan metode dokumentasi agar mendapatkan data-data yang dapat menjadi sumber yang relevan.

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

a. Bentuk Konflik Sosial Pilkada Di Kabupaten Luwu Timur

Pemilihan Umum Kepala daerah dan wakil kepala daerah yang sering disebut dengan pemilukada, baik dalam pemilihan gubernur dan wakil gubernur maupun pemilihan bupati/wali kota dan wakil bupati/wakil wali kota merupakan perwujudan pengembalian hak-hak rakyat dalam memilih pemimpin di daerah. Pemilukada langsung tersebut, rakyat memiliki kesempatan proses kedaulatan untuk menentukan pemimpin daerah secara langsung, bebas, rahasia, dan otonom.

Pemilihan umum kepala daerah atau pemilukada secara serentak yang diselenggarakan tahun 2020 yang lalu diwarnai beberapa konflik di dalamnya baik konflik antar elit lokal maupun para pendukung pasangan calon tersebut. Hal ini menyebabkan perseteruan antara para massa pendukung calon kepala daerah dan wakil kepala daerah yang berbeda pendapat. konflik secara kekerasan fisik , dan konflik yang bentuknya kekerasan non fisik , kekerasan non fisik yaitu kekerasan verbal.

Hasil penelitian ini menemukan bentuk- bentuk konflik yaitu:

- 1) Konflik yang bentuknya kekerasan fisik adalah kekerasan yang kasat mata artinya siapapun bisa melihatnya karena terjadi sentuhan fisik anatar pelaku dengan korbannya. Seperti yang dikatakan informan ini tergolong dalam konflik yang

bentuknya kekerasan fisik. Ada 2 kasus menurut informan yang peneliti temui dilokasi penelitian yaitu:

“Ada itu hari sebelum pemilihan tetanggaku suami istri tidak baku omong 1 minggu hanya karna beda pilihan calon bupati istri memilih pasangan nomor urut 1 suami memilih pasangan nomor urut 2 masing-masing mi sama tidak saling memperdulikan karna sibuk mi urus calonnya masing-masing tapi waktu sudah mi pemilihan baku omongmi lagi, ada juga 2 hari sebelum pemilihan pertengkaran anak muda di perbatasannya itu langkea raya dengan baruga tapi untung dicegahji sama tokoh adat, tapi setelah pemilihan masih tidak terlalu baku omong juga 1 bulan meni itu sudahnya pemilihahan baru baku omong kayak dulu”¹¹

- 2) Bentuk konflik kekerasan verbal adalah kekerasan yang dilakukan lewat kata-kata. Contohnya: membentak, memaki, menghina, menjuluki, meneriaki, mengfitnah, menuduh, memermalukan depan umum dengan lisan dll.

“Disini desa memang ada konflik , konfliknya macam-macam ada yang hanya bercekcok waktu sebelum pemilihan dan pas hari pemilihannya tapi sementara ji itu wajarji begitu kalau pesta demokrasi malahan disekitar rumahku itu ada yang dari tim pendukung pasangan calon nomor urut 1 ada juga dari pendukung pasangan calon nomor urut 2 tapi bukan ji pendukung garis keras jadi waktunya sudah pemilihan langsungji mengacara kapurung lagi bakar-bakar ikan juga waktu malam setelah pemilihan, itu tommy yang sakit(menyimpan dendam pemilihan) yang sakit itu yang waras kembali ji normal kembaliji berinteraksi seperti sebelum-sebelumnya”.¹²

Hasil penelitian ini juga menunjukkan bahwa bentuk kasus konflik yang terjadi ada 2 yaitu bentuk secara kekerasan fisik dan bentuk secara kekerasan verbal. Ada elit local yang ikut dalam kasus konflik seperti kepala desa yang berkonflik dengan masyarakatnya dimana seharusnya Kepala desa memberikan conoh yang baik kepada masyarakat , sedangkan fakta di lapangan tidak seperti itu.

b. Relasi Masyarakat Sebelum dan Sesudah Pilkada Kabupaten Luwu Timur

Relasi sebagai kebutuhan dasar psikologis manusia ialah hakikat yang tidak dapat di manipulasi. Ada 4 bentuk relasi yang terajdi di lokasi penelitian yaitu relasi interpersonal, relasi dinamika kelompok, relasi antar kelompok, relasi hubungan keluarga.

- 1) Relasi Masyarakat sebelum pemilihan bupati 2020 baik-baik saja seperti biasanya itu di ikuti dengan penjelasan informan.

“Itu masyarkat sebagian disini baik-baikji kuliat ada memang yang tidak baku bicara tapi itu sementaraji 1 minggu setelah pemilihan normal mi lagi bahkan mengacara mi

¹¹Agus (30 Tahun) Kepala Desa, wawancara, 11 April 2021, Desa Langkea Raya

¹²Nathan (54 Tahun) Kepala Desa, wawancara, 11 April 2021, Desa Langkea Raya Kecamatan Towuti Kabupaten Luwu Timur.

*lagi, sebelum pesta demokrasi memang bagus semua ji relasinya tapi setelah pemilihan kembali lagi normal seperti biasanya”.*¹³

*“Sementara ji itu kalau tidak baku bicara selesai masa-masa pesta demokrasi baku bicarami tapi begitumi juga ada juga sebagian masyarakat yang sampai sekarang tidak terlalu baku bicarami seperti dulu waktu sebelum masa pemilihan”.*¹⁴

Dari penjelasan beberapa informan di atas menunjukkan bahwa sebelum pemilihan relasi masyarakat baik-baik saja sehingga interaksi antar masyarakat yang satu dengan masyarakat lainnya itu baik-baik saja masih mengedepankan jiwa-jiwa sosial.

2) Relasi masyarakat setelah pemilihan Bupati 2020

Ada beberapa yang sampai saat ini relasinya kurang baik, bahkan ada salah satu informan sampai saat ini interaksinya sudah tidak baik. Di jelaskan dengan beberapa penjelasan informan:

*“ Tidak baikmi relasiku saya pribadi dengan itu kepala desa karena dia tongji yang mulai, karena saya sudahma minta maaf, tapi masih begituji. Bahkan dia ji pengaruhi staf desa lainnya untuk tidak kasih baik relasiku dengan yang lainnya”.*¹⁵

*“Ada disni tetanggaku saudaraji tapi tidak baku omongmi sampai sekarang karena beda pilihanji padahal itu di bilang sodara ji na gara-gara beda pilihannya ji na tridak baku omong mi”.*¹⁶

Dari semua kasus yang terjadi pasca pemilihan bupati luwu timur 2020 baik itu bentuk konflik maupun relasi msyarakat yang terjadi, peneliti mengamati di lokasi penelitian memang betul pemilihan bupati dan wakil bupati di warnai beberapa konflik baik itu konflik secara fisik maupun non fisik, yang menajadi faktor utama penyebab konflik tidak lain adalah hanya karena berbeda pilihan masing-masing pendukung calon mempertahankan calonnya, setelah terjadi konflik interaksi antar individu denagn individu lainnya maupun dengan kelompok lainnya menajadi tidak baik, dan mengakibatkan relasi di antara mereka ada yang tidak baik, yang awalnya mereka satu kelompok tetapi setelah terjadi konflik relasi mereka jadi kurang baik.

¹³Nathan (54 Tahun) Kepala Desa, *wawancara*, 11 April 2021, Desa Langkea Raya Kecamatan Towuti Kabupaten Luwu Timur.

¹⁴Agus(30 tahun) Anggota Bawaslu, *wawancara*, 12 April 2021, Desa Langkea Raya Kecamatan Towuti Kabupaten Luwu Timur.

¹⁵Farida (41 tahun) ibu rumah tangga, *wawancara*, 12 April 2021, Desa Baruga Kecamatan Towuti Kabupaten Luwu Timur

¹⁶Justari(40 Tahun)sekertaris Desa Tampinna, *wawancara*, 17 Mei 2021, Desa Tampinna Kecamatan Angkona Kabupaten Luwu Timur

D. Penutup

1. Bentuk konflik sosial pada pilkada di Kabupaten Luwu timur kecamatan Towuti Desa Langkea Raya, dan Kecamatan Angkona Desa Tampinna ada bentuknya yang mengakibatkan kekerasan ada juga yang tidak sampai mengakibatkan kekerasan, bahkan ada sekelompok elit ikut serta dalam konflik tersebut seharusnya mereka mengayomi masyarakat malah sebaliknya tidak memberikan contoh yang baik. Dari beberapa kasus konflik dapat di cegah oleh tokoh adat dan tokoh-tokoh masyarakat, penyebab utama konflik itu hanya karena berbeda pilihan satu sama lain saling mempertahankan calonnya.
2. Relasi Masyarakat di Kabupaten Luwu timur kecamatan Towuti Desa Langkea Raya, dan Kecamatan Angkona Desa Tampinna sebelum masa pemilihan relasi masyarakat baik-baik saja , tetapi setelah pemilihan ada yang sampai saat ini tidak melakukan interaksi sama sekali, ada juga beberapa yang relasinya yang tidak baik itu hanya sebatas masa-masa pesta demokrasi saja.

DAFTAR PUSTAKA

Jurdi, S. *Studi Ilmu Politik*. Yogyakarta: Graha Ilmu, 2014.

Mufti, M. *Teori-Teori Politik*. Bandung: Cv. Pustaka Setia, 2013.

Sudaryono dalam Cresell. *Metodologi Penelitian*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2017.

Surbakti, R. *Memahami Ilmu Politik*. Jakarta: Gramedia Widia Sarana Indonesia, 2010.

Suripto. "Analisis Penyelesaian Sengketa atau Konflik Politik", dalam *Jurnal Politikologi*, 2016.

Wirawan, I.B. *Teori-Teori Sosial dalam Tiga Paradigma*. Jakarta: Kencana, 2012.